

**OPTIMALISASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi kasus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dompu)**

Moh. Bayu Naufal Ghinaldi

NPP. 32.0625

*Asdaf Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: [32.0625@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0625@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi: Fitri Yul Dewi Marta, S.IP, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** The SIPD was created by the Ministry of Home Affairs to assist local governments in integrating data and improving the accountability and transparency of regional financial statements. However, its application to the Dompu Regency BPKAD is not optimal so that it can interfere with the process of preparing regional financial statements. **Objective:** This study aims to find out the extent of optimizing the implementation of SIPD in BPKAD Dompu Regency and identify supporting factors, inhibiting factors and efforts made in optimizing the implementation of SIPD in BPKAD Dompu Regency. **Methods:** This study used a descriptive qualitative approach. Data collection techniques through semi-structured interviews, observation and documentation of all those involved in the process of optimizing the implementation of SIPD at BPKAD Dompu Regency. Data analysis with the Miles and Huberman analysis model. **Results/Findings:** based on the results of the analysis conducted, the implementation of SIPD in BPKAD Dompu Regency has not been optimal in the field of accounting based on the dimensions of system quality, information quality, usage, user satisfaction and net benefits that have not been met due to system errors, slow network, and reporting features. **Conclusion:** The optimization of the implementation of SIPD in BPKAD Dompu Regency has not been optimal because the error system, slow network, and incomplete reporting features increase the risk of human error. Optimization efforts are focused on improving the network and developing support systems. The main recommendation is to divide the server by region so that the load is evenly and quickly in responding to the problems found.

**Keywords:** Information Systems, Local Government, Quality of Financial Statements.

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** SIPD diciptakan oleh Kemendagri untuk membantu pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data serta meningkatkan akuntabilitas serta transparansi laporan keuangan daerah. Namun penerapannya pada BPKAD Kabupaten Dompu belum optimal yang diakibatkan sistem eeor, jaringan kurang stabil, dan beban kerja yang bertambah sehingga dapat mengganggu proses peyusunan laporan keuangan daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat

dan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi terhadap semua yang terlibat dalam proses optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu. Analisis data dengan model analisis Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu belum optimal di bidang akuntansi didasari dimensi kualitas sistem, kualitas informasi, penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat bersih yang belum terpenuhi akibat sistem error, jaringan lambat, fitur pelaporan belum dan beban kerja bertambah. **Kesimpulan:** Optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu belum optimal karena sistem error, jaringan lambat, dan fitur pelaporan belum lengkap yang meningkatkan resiko human error. Upaya optimalisasi difokuskan dalam peningkatan jaringan serta pengembangan sistem pendukung. Rekomendasi utama ialah membagi server per regional agar beban merata dan cepat dalam menanggapi permasalahan yang ditemukan.

**Kata kunci:** Sistem Informasi, Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini diwujudkan melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Proses ini harus dijalankan berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Mardiasmo (2021), transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik merupakan kunci dalam memperkuat demokrasi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik (Pimenta & Seco, 2021). Sejalan dengan hasil studi Kalogirou et al., (2022) menunjukkan bahwa sistem informasi publik yang terintegrasi mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mengurangi kesalahan pencatatan, serta memperkuat akuntabilitas fiskal

Bentuk implementasi transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah itu diwujudkan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan informasi keuangan yang mudah diakses publik. Untuk menunjang hal ini, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sebuah platform berbasis web yang mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan daerah. SIPD menjadi alat bantu penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, serta mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut di wujudkan melalui penyusunan laporan keuangan daerah yang berkualitas melalui SIPD. Menurut Suwanda (2015) laporan keuangan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam menggunakan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintah. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Sinurat (2018), Tujuan laporan keuangan

adalah untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun harus dapat mencerminkan informasi sumber daya yang digunakan, dalam pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan, posisi keuangan pemerintahan, evaluasi terkait efektifitas dan efisiensi suatu entitas akuntansi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan SIPD dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah sejak tahun 2021. Dalam proses pengelolaan keuangan, Kabupaten Dompu berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama sepuluh tahun berturut-turut (2014–2023). Hal ini menjadi indikator positif atas tata kelola keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan SIPD masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam penerapan modul akuntansi dan pelaporan (SIPD AKLAP).

Menurut Heeks (2005) tantangan dalam penerapan sistem informasi publik sering kali muncul akibat kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, yang menyebabkan kegagalan sistem dalam memberikan output yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan Jaeger & Thompson (2003) yang menyatakan bahwa sistem informasi sektor publik sering menghadapi hambatan berupa tidak efisiensinya teknologi, kesenjangan pelatihan, dan resistensi organisasi. Penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu ditemukan bahwa kendala utama terletak pada gangguan jaringan dan sistem error yang terjadi akibat tingginya beban akses dari seluruh daerah. Selain itu, terdapat permasalahan teknis seperti data yang tidak tersimpan, akun atau kode rekening yang tidak muncul, serta format laporan yang tidak sesuai dengan standar pemeriksaan BPK. Permasalahan-permasalahan ini berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan dan pencairan anggaran, serta meningkatkan beban kerja pegawai. Sejalan dengan penelitian oleh Scholl & Klischewski (2007), keberhasilan implementasi e-government, termasuk sistem informasi keuangan daerah, sangat bergantung pada kualitas teknis sistem dan dukungan organisasi yang memadai.

Penelitian ini difokuskan pada studi kasus di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Dompu guna memberikan gambaran komprehensif mengenai proses penerapan, faktor pendukung dan faktor hambatan, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan optimalisasi penerapan sistem tersebut.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada efektivitas, implementasi dan optimalisasi SIPD secara umum di tingkat daerah atau pemerintahan daerah secara keseluruhan. Kajian-kajian tersebut cenderung bersifat makro dan tidak secara spesifik mengupas penerapan SIPD di tingkat instansi atau unit kerja tertentu. Sehingga pemahaman mengenai tantangan, kendala teknis, serta dampak penerapan SIPD dalam lingkup operasional instansi pemerintah masih kurang digali secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan yang lebih terfokus dan mendalam mengenai penerapan SIPD pada tingkat instansi guna memberikan gambaran yang lebih mendalam, serta sebagai masukan strategis dalam upaya optimalisasi sistem informasi ini di lingkungan pemerintahan.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merujuk pada sejumlah studi sebelumnya yang menunjukkan penerapan SIPD masih menghadapi berbagai kendala. Andy Chandra Pramana dkk (2023) menemukan bahwa SIPD di BPKAD Kabupaten Nganjuk belum efektif akibat sistem yang lambat dan ketergantungan pada sistem pendukung lain. Kadek Prawira Wahyudi (2024) mencatat hambatan berupa keterbatasan SDM, aplikasi yang belum stabil, serta kurangnya komunikasi

antara pemerintah daerah dan pusat. Elisyé Lumuly, dkk (2024) menyimpulkan bahwa meskipun SIPD tidak berdampak langsung pada kualitas laporan keuangan, efektivitas penggunaannya berpengaruh signifikan. Tumija, dkk (2023) menemukan kendala teknis pada sistem AKLAP, termasuk fitur yang tidak dapat diakses dan kelemahan server. Sementara itu, Putri Pandan Wangi (2023) mencatat bahwa SIPD di Kabupaten Semarang belum efektif dan masih memerlukan sistem tambahan seperti SIPKD untuk mendukung pelaporan keuangan..

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Kebaharuan dalam penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji optimalisasi penerapan SIPD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan studi kasus BPKAD Kabupaten Dompu dengan pendekatan kualitatif. Berbeda dengan Elisyé Lumuly dan Rita J. D. Atarwaman (2024) yang menggunakan metode kuantitatif dan membahas implementasi serta efektivitas SIPD di tingkat Kabupaten Ambon, serta penelitian Andy Chandra Pramana dkk (2023), Tumija, dkk (2023), serta Putri Pandan Wangi (2023) yang mengkaji efektivitas SIPD di lokasi berbeda dengan pendekatan dan indikator lain serta secara makro pada suatu daerah, sedangkan penelitian Kadek Prawira Wahyudi (2024) juga hanya mengkaji optimalisasi di tingkat pemerintah daerah, penelitian ini menggunakan indikator optimalisasi menurut Delone dan McLean, yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, pengguna, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih, objek pada penelitian ini juga berfokus pada proses penyusunan laporan keuangan melalui penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu terkhusus di bidang akuntansi, yang belum banyak dikaji dalam studi terdahulu. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspekti baru dan mendalam terhadap penerapan SIPD pada tingkat OPD di suatu daerah.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu serta mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi penerapan SIPD di tingkat OPD yaitu BPKAD Kabupaten Dompu.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan membahas optimalisasi penerapan SIPD secara mendalam melalui makna, perspektif dan pengalaman individu dalam konteks penerapan SIPD, bukan sekedar mengukur atau menghitung menurut Fernandes (2017) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kompetensi dan pemahaman terhadap penerapan SIPD yang terdiri dari informan kunci, yaitu Kepala BPKAD Kabupaten Dompu, Sekretaris BPKAD Kabupaten Dompu, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan dan kas daerah, Kepala Bidang Akuntansi serta kepala Subbidang dan beberapa operator SIPD di Kabupaten Dompu. Penelitian ini dilakukan selama 20 hari di BPKAD Kabupaten Dompu. Analisis data dilakukan dengan model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan menggunakan teori kesuksesan sistem informasi menurut DeLone & McLean (2003) dalam buku Tajuddin dkk, (2016), yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, pengguna, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan lebih dalam proses penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan terkhusus di bidang akuntansi.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kualitas Sistem

Kualitas sistem merupakan variable yang digunakan untuk menilai pengaruh sistem terhadap jenis pelayanan yang dapat disediakan dan seperti apa hasil yang diperoleh nantinya. Penulis mengukur kualitas sistem beberapa indikator, yaitu, akses, kemudahan pengguna, keamanan, waktu tanggap, dan kenadalan sistem. Dalam penerapannya pada BPKAD Kabupaten Dompu, SIPD memiliki kemudahan dalam hal akses karena berbasis online dan tanpa perlu perangkat tambahan. Kemudahan tersebut merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki oleh SIPD. Selain kemudahan dalam hal akses, SIPD juga memiliki keunggulan pada sistem keamanannya yang dilengkapi dengan enkripsi data dan otoritas akses. Namun penulis menemukan permasalahan dalam penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu, yaitu, sistem error pada jam-jam sibuk. Tingginya trafik saat jam kerja sering menyebabkan gagal akses, data tidak tersimpan, atau input ganda. Masalah ini berdampak pada kinerja pegawai dan meningkatkan potensi human error dalam penginputan data.

Hasil wawancara dengan kepala bidang anggaran BPKAD, beliau mengungkapkan :

Penerapan SIPD di bidang anggaran memberikan pengaruh yang cukup baik. SIPD mudah diakses karena berbasis online tanpa perlu menginstal perangkat lunak tambahan serta cukup menggunakan browser, Adapun modul juga diberikan sebagai pegangan bagi pengguna. SIPD juga cukup aman karena memiliki otoritas akses, sudah menerapkan enkripsi data serta selalu ada peningkatan pada kemanannya. Untuk masalah responsive, SIPD sudah cukup baik untuk itu. Namun, saat trafik sedang tinggi SIPD juga sering mengalami masalah teknis akibat dari jaringan yang lambat, sistem yang terkadang eror dan hal ini biasanya terjadi Ketika jam padat kerja, akibatnya sering terjadi kesalahan input dan cukup banyak menyita waktu terlebih Ketika jadwal penyusunan laporan keuangan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala perbendaharaan dan kas daerah, beliau mengungkapkan :

SIPD cukup baik dalam hal kemudahan akses serta mudah dalam menggunakannya. Selain itu keamanan yang ada pada sistem ini bisa diandalkan. Dan dalam hal responsivitasnya, SIPD cukup baik dengan catatan Ketika jam kerja tidak padat. Karena biasanya Ketika jam kerja padat sering mengalami gangguan sistem. Dampaknya adalah saat menginput data, sering terlambat bahkan ada data yang dua kali terinput

Sedangkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi dan pelaporan, ditemukan fakta bahwa penerapan SIPD baru digunakan untuk laporan keuangan T.A 2023, dalam wawancaranya beliau mengungkapkan :

SIPD cukup mudah dalam aksesibilitasnya karena memang hanya perlu membuka pada situs saja sehingga dapat mudah diakses dari berbagai perangkat yang memiliki koneksi pada internet. SIPD untuk bagian pelaporan baru ada pada pertengahan tahun 2024, sehingga terdapat beberapa fitur yang belum dipahami secara mendalam walaupun sudah diberikan modul. Dalam aspek keamanan, SIPD dilengkapi dengan mekanisme yang aman dan kami merasa cukup terjamin dengan hal tersebut. Dalam kondisi normal SIPD cukup responsive tetapi sering eror saat saat jam tertentu terlebih saat dekat dengan pelaporan keuangan tahunan dan juga SIPD sering mengalami downtime dan kadang beberapa fitur yang ada tidak berjalan optimal sehingga dikhawatirkan SIPD yang harusnya membantu malah menimbulkan masalah baru. Contohnya ada beberapa akun yang double pengakuan saat penyusunan LRA menyebabkan kami harus teliti dan melakukan validasi data. Kami berharap



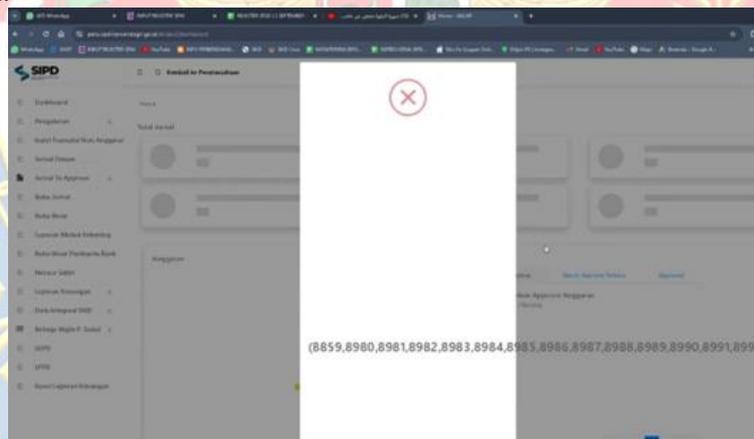
yang membantu kami dalam menyediakan informasi yang komplit. Namun, masih ada tantangan sistem yang eror dan jaringan yang melambat akibatnya, dalam hal konsistensi dan ketepatan waktu kami menjadi terlambat dalam menyusun anggaran.

Hasil wawancara dengan kepala subbidang verifikasi dan penatausahaan juga mengungkapkan :

Penggunaan SIPD di bidang penatausahaan cukup baik dari segi kualitas informasi. SIPD sangat membantu dalam penyediaan informasi yang memiliki akurasi yang baik, serta informasi relevan dan lengkap dalam proses pencatatan, pembukuan dan inventarisasi aset daerah. Walaupun terkadang informasi anggaran pada RKA yang dihasilkan oleh SIPD ini kurang konsisten yang disebabkan sistem eror dan mengganggu kami dalam proses pencatatan. Walaupun berhasil melakukan pencatatan dan pembukuan biasanya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukannya..

Sedangkan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi mengungkapkan hal yang cukup berbeda, dalam wawancaranya beliau mengungkapkan:

SIPD di bidang pelaporan masih baru sehingga masih banyak kendala yang dihadapi. Ketika menggunakannya, walaupun untuk relevansi dan keakuratan data. Ketika kami ingin mencatat pada buku besar sudah cukup baik dan sangat membantu kami dalam proses pengujian atas bukti transaksi, tapi dilain sisi kami masih menghadapi beberapa kendala seperti double pengakuan yang menyebabkan ketidaksesuaian laporan. Konsistensi informasi dalam SIPD masih menjadi tantangan. Meskipun sistem ini dirancang untuk terintegrasi, terkadang kami menemukan perbedaan antara data yang tercatat dalam modul yang berbeda, seperti data realisasi anggaran dan laporan keuangan. Juga beberapa fitur belum ada dalam proses penyusunan laporan keuangan.



Sumber : SIPD.Kemendagri.id

Gambar 1. 2 Proses Pengimputan yang mengalami kegagalan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menarik Kesimpulan bahwa Kualitas informasi SIPD cukup memenuhi harapan pada sub bidang penyusunan anggaran dan sub bidang penatausahaan pada indikator akurasi, relevansi dan kelengkapan informasi. Namun, pada bagian konsistensi dan ketepatan waktu masih menjadi tantangan yang perlu dihadapi. sedangkan untuk bidang akuntansi dan pelaporan, kelengkapan informasi masih terkendala pada fitur yang ada pada SIPD yang dikarenakan tahapan SIPD pada bagian tersebut baru ada di penghujung tahun 2024 ditambah permasalahan sistem yang error yang mempengaruhi indikator konsistensi dan ketepatan waktu. Walaupun, indikator akurasi dan relevansi informasi sudah memenuhi harapan bidang akuntansi.

### 3.3 Kualitas Pelayanan

kualitas pelayanan adalah semua hal dalam bentuk layanan yang dapat diberikan oleh entitas pengembang kepada penggunaannya. Layanan yang dimaksud meliputi pembaharuan sistem hingga tanggapan dari entitas pengembang jika mengalami kendala pada sistem. Penulis mengukur kualitas pelayanan dengan indikator ketanggapan, jaminan, empati, berwujud, dan keandalan. Penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu memiliki kualitas pelayanan yang baik dari kemandagri sebagai pihak pengembang dari SIPD. Sebagai sistem yang selalu mendapat peningkatan dan pemeliharaan fitur-fitur yang ada pada sistemnya diharapkan mampu memenuhi harapan pengguna. Peningkatan dan pemeliharaan ini diharapkan juga akan berdampak pada peningkatan produktivitas serta efisiensi dalam pengelolaan dan informasi laporan keuangan di BPKAD. Namun demikian, meskipun pelayanannya sudah cukup baik dari pihak pengembang, Ketika menghadapi tantangan teknis berupa sistem yang mengalami error serta kesalahan non teknis berupa kesalahan input akibat dari sistem error dinilai lambat dalam memberikan respon untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

Adapun wawancara yang dilakukan Bersama salah satu operator SIPD di bidang penyusunan anggaran mengungkapkan bahwa:

Update dilakukan secara berkala, terutama jika ada kebijakan baru serta peningkatan keamanan, perbaikan bug, dan kadang ada fitur baru yang ditambahkan agar lebih memudahkan pengguna dalam mengelola informasi keuangan. Maintenance juga dilakukan untuk memastikan sistem tetap stabil dan bisa diakses tanpa kendala. Hal ini melibatkan optimalisasi server, peningkatan kecepatan akses, dan penyesuaian dengan kebijakan terbaru. terkadang ada kendala teknis seperti gangguan akses sementara. Namun, pengembang selalu menyediakan panduan serta dukungan teknis agar pengguna bisa segera beradaptasi dengan perubahan yang ada walaupun terkesan lambat

Kepala BPKAD dalam wawancaranya mengungkapkan :

SIPD selalu mendapatkan peningkatan pada sistemnya namun, kami merasa peningkatan tersebut masih kurang optimal. contohnya Ketika terdapat kesalahan teknis saat penyusunan laporan keuangan, kami biasanya akan membuat laporan perbaikan yang kemudian kami bawa hal tersebut ke Jakarta. Hal ini terjadi karena respon dari pihak pengembang masing tergolong lambat dalam merespon laporan kami.

Sejalan dengan hal tersebut, salah satu operator SIPD pada bidang anggaran mengungkapkan :

Pihak pengembang selalu memberikan perhatian dalam bentuk pemeliharaan serta peningkatan fitur yang sudah ada terlebih Ketika kami membutuhkan data untuk rekonsiliasi realisasi pendapatan kami merasakan fitur yang memuat data tersebut semakin mudah dan sederhana dalam penggunaannya.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menilai bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh SIPD dalam indikator keterjaminan, keandalan, empati, dan berwujud sudah baik. Namun masih dalam hal respon masih tergolong kurang karena Ketika pengguna menemukan bug dan membuat laporan bug, respon dari pihak kemandagri selaku pengembang masih lambat. BPKAD Dompu biasanya akan melakukan perjalanan dinas untuk segera melakukan perbaikan yang dikhawatirkan memperlambat mereka dalam bertugas nantinya

### 3.4 Penggunaan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ditemukan bahwa penggunaan SIPD pada BPKAD Kabupaten Dompu belum digunakan sebagai sistem tunggal di semua bidang. Bidang yang menggunakan SIPD sebagai sistem tunggal hanyalah

bidang anggaran dan bidang perbendaharaan dan kas daerah. Sedangkan pada bidang Akuntansi, penggunaan SIPD belum menjadi sistem tunggal dalam penyusunan laporan keuangan. Pada bidang akuntansi penggunaan SIPD masih dipadukan dengan pencatatan manual serta inovasi Sistem Penunjang Aplikasi SIPD (SiPAS) yang bertujuan sebagai penunjang dari SIPD itu sendiri yang masih belum memiliki fitur yang lengkap serta masih sering bermasalah. SiPAS ini merupakan inovasi yang menunjang kekurangan SIPD yang masih belum memiliki fitur akun untuk pencatatan JKN, Jamsos, DANA BOS serta dana tranfer pemerintah pusat lainnya yang bersifat Non RKUD. Dalam mengukur intensitas penggunaan tersebut penulis menggunakan indikator penggunaan yang dilaporkan dan penggunaan nyata. Hal tersebut menjadi alasan utama bagi bidang akuntansi untuk menyediakan sistem penunjang serta pencatatan manual untuk mengolah data agar meminimalisis kesalah dalam penyusunan laporan. SIPD yang belum optimal tersebut tentunya berdampak pada kepuasan pengguna, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap manfaat bersih (net benefits) yang diperoleh BPKAD Kabupaten Dompu.

Tabel 1. 1 Penggunaan Sistem input dan olah data

No.	Bidang	Sistem input dan pengolah data
(1)	(2)	(3)
1.	Anggaran	SIPD
2.	Perbendaharaan dan Kas Daerah	SIPD
3.	Akuntansi	1. SiPAS 2. Pencatatan Manual 3. SIPD

Sumber : Diolah penulis

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara dengan kepala bidang akuntansi dan pelaporan, beliau mengungkapkan :

Walaupun SIPD ini menjadi amanat kemendagri sebagai inovasi yang wajib digunakan di setiap daerah di Indonesia. Tetapi untuk BPKAD Kabupaten Dompu sendiri SIPD masih belum kami gunakan sepenuhnya dan hanya sebagai alat pendukung dalam proses pencatatan dan pelaporan. Masih banyak kekurangan yang ada pada SIPD, maka untuk mengatasi hal tersebut kami masih menggunakan kertas kerja sebagai pencatatan manual serta mengembangkan inovasi berupa Sistem Penunjang Aplikasi SIPD (SiPAS) yang bisa kami gunakan berbarengan dengan SIPD.

Selain itu hasil wawancara dengan operator SIPD di bidang akuntansi dan pelaporan juga menyapaikan hal yang sama, beliau mengatakan :

Di bidang akuntansi, kami masih menggunakan pencatatan manual dan menggunakan Sistem Penunjang Aplikasi SIPD (SiPAS) sembari menggunakan SIPD. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian kami dalam menghindari risiko terhadap potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses pencatatan, sehingga seluruh transaksi keuangan dapat tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mengkolaborasi metode manual dan sistem digital, kami berupaya menciptakan sistem akuntansi yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan dari SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu masih belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih berfungsi sebagai alat pendukung dalam pengelolaan keuangan. Meskipun SIPD terus dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan, sistem ini masih memerlukan penyesuaian serta penyempurnaan agar dapat sepenuhnya menggantikan metode pencatatan manual yang telah lama digunakan.

### 3.5 Kepuasan Pengguna

Kepuasan pengguna dapat dipengaruhi dengan kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas pelayanan. Untuk mengukur kepuasan tersebut, penulis menggunakan indikator efisiensi, efektivitas, dan kepuasan. Penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu mendapat dua respon yang berbeda. Bidang Anggaran merasa cukup puas dengan SIPD karena membantu dalam proses penyusunan anggaran dan pengendalian anggaran. Sedangkan di bidang Akuntansi dan Pelaporan, SIPD belum memberikan kepuasan dalam penggunaannya yang disebabkan masih banyak fitur yang belum optimal, sistem yang sering mengalami masalah dan SIPD yang masih belum bisa menggantikan peran dari pencatatan manual. Hal ini juga dirasakan oleh bidang perbendaharaan dan kas daerah terkhusus pada sub bidang verifikasi dan penatausahaan. Beberapa aspek dalam SIPD belum optimal dalam proses penatausahaan yang dikarenakan sistem error yang mengakibatkan keterlambatan dalam pengimputan.

Hasil wawancara dengan kepala subbidang pengendalian anggaran menyatakan cukup puas dalam penggunaan SIPD, beliau mengungkapkan :

Bidang Pengendalian Anggaran merasa cukup puas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) karena sistem ini sangat membantu dalam proses penyusunan dan pengendalian anggaran. Dengan adanya SIPD, proses perencanaan anggaran menjadi lebih terstruktur, transparan, dan efisien serta memungkinkan integrasi data yang lebih baik antara berbagai unit kerja, sehingga memudahkan dalam penyusunan anggaran yang lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan serta kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, fitur pengendalian anggaran dalam SIPD membantu dalam memantau realisasi anggaran secara real-time, sehingga meminimalkan risiko penyimpangan dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan hasil wawancara dengan kepala subbidang pelaporan dan pertanggungjawaban belum memperoleh kepuasan, beliau menyampaikan alasannya sebagai berikut:

Salah satu kendala utama adalah masih banyaknya fitur dalam SIPD yang belum optimal. Beberapa fitur yang diharapkan dapat mempermudah proses pelaporan masih belum berjalan dengan maksimal atau tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pengguna di daerah. Proses pelaporan, konsolidasi, dan rekonsiliasi yang seharusnya efisien menjadi lebih lama dan berisiko menimbulkan kesalahan dalam penyajian data. SIPD masih belum sepenuhnya dapat menggantikan peran pencatatan manual. Banyak pengguna masih harus melakukan pencatatan secara manual sebagai langkah cadangan atau bahkan sebagai proses utama karena sistem belum bisa diandalkan sepenuhnya.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan kepala subbidang pengelolaan gaji juga merasa belum puas. Dalam wawancaranya beliau menyampaikan :

Beberapa aspek dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada bidang pengelolaan gaji masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Kendala utama yang dihadapi antara lain terkait dengan masalah jaringan yang tidak stabil serta kesalahan teknis dalam sistem. Gangguan jaringan dapat menyebabkan keterlambatan dalam proses input dan pengolahan data gaji, yang berakibat pada efisiensi dan efektivitas kerja pada bidang pengelolaan gaji pegawai.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pengguna bergantung pada kemudahan dan bantuan yang diberikan SIPD kepada pengguna. SIPD pada sub bidang pengendalian anggaran dapat dikatakan sudah berjalan dengan optimal karena dapat memenuhi indikator efisiensi, efektivitas dan kepuasan dari bidang tersebut. Penerapan

SIPD pada sub bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan masih belum memenuhi karena belum memberikan efektivitas, efisiensi dan kepuasan dalam proses pelaporan, rekonsiliasi, dan konsolidasi data pendapatan dan belanja. Sedangkan penerapan SIPD pada sub bidang verifikasi dan penatausahaan serta sub bidang pengendalian anggaran belum optimal karena belum memenuhi indikator efisiensi, efektifitas dan kepuasan..

### **3.6 Manfaat Bersih**

Penulis mengukur manfaat bersih dengan indikator peningkatan kinerja, kualitas informasi, dan kemudahan informasi. Penulis menemukan bahwa manfaat bersih dalam penerapan SIPD belum memberikan manfaat yang merata di semua bidang. Penulis menemukan bahwa manfaat SIPD belum merata di semua bidang. Bidang anggaran merasakan peningkatan efisiensi, penatausahaan mulai merasakan dampak positif meski ada kendala teknis, sementara bidang akuntansi masih bergantung pada pencatatan manual. Integrasi SIPD di bidang akuntansi perlu dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan lebih luas.

Hasil wawancara dengan kepala BPKAD menyampaikan bahwa :

Penerapan SIPD belum memberikan manfaat secara menyeluruh di semua bidang. Bidang anggaran merasakan dampak positif dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, kemudian terdapat kemudahan dalam mengakses informasi penyusunan anggaran dengan kualitas yang baik serta terjadi peningkatan kinerja. sementara bidang penatausahaan mulai merasakan dampak positif dengan ketersediaan informasi pengelolaan gaji dan verifikasi anggaran meski masih menghadapi kendala teknis. Namun, bidang akuntansi belum merasakan manfaatnya karena masih menggunakan pencatatan manual.

Hal tersebut juga disampaikan oleh kepala bidang akuntansi, beliau mengatakan :

SIPD yang saat ini hanya bisa kami manfaatkan untuk memperoleh informasi laporan LRA. Sedangkan untuk yang lain belum bisa. Dikarenakan SIPD ini belum sepenuhnya dapat membantu kami dalam proses akuntansi dan penyusunan laporan. SIPD belum memberikan kami manfaat yang kami harapkan dari sistem ini, masih banyaknya fitur yang perlu dikembangkan lagi, perlu nya penyesuaian pilihan menu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan yang paling perlu untuk ditingkatkan dari SIPD ini adalah eror sistem yang dikhawatirkan ketika digunakan sepenuhnya dapat membuat laporan keuangan yang tadi nya sudah disusun berdasarkan ketentuan malah kacau akibat tidak tersimpan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa SIPD belum memberikan manfaat bersih secara merata. Manfaat bersih yang dirasakan adalah memberikan dampak positif terhadap kemudahan akses informasi, kualitas informasi dan peningkatan kinerja pada bidang anggaran dan bidang perbendaharaan dan kas daerah. Sedangkan pada bidang akuntansi dan pelaporan masih belum memberikan dampak positif karena tidak terjadi peningkatan kinerja, dan peningkatan kualitas informasi. Walaupun mendapat dampak positif dalam hal kemudahan akses informasi laporan keuangan.

### **3.7 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih belum berjalan secara optimal. Faktor utama yang teridentifikasi meliputi seringnya sistem mengalami error, lambatnya koneksi jaringan yang menghambat akses dan penggunaan sistem, serta meningkatnya beban kerja pegawai yang harus mengatasi berbagai hambatan teknis secara manual. Temuan ini tidak berdiri sendiri, melainkan memperkuat berbagai hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan pola permasalahan serupa. Sama halnya dengan temuan Andy Chandra Pramana dkk (2023) di BPKAD Kabupaten Nganjuk menemukan bahwa SIPD belum berjalan efektif dan efisien karena kinerja sistem yang lambat dan ketergantungan pada sistem pendukung lainnya. Hal ini

menggambarkan bahwa meskipun SIPD dirancang sebagai sistem utama dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam praktiknya sistem ini belum dapat berdiri sendiri dan justru menciptakan ketergantungan baru.

Sama halnya dengan penelitian Kadek Prawira Wahyudi (2024) dan Tumija dkk (2023) turut menyoroti keterbatasan kemampuan sumber daya manusia serta kondisi aplikasi SIPD yang masih dalam tahap pengembangan dan belum stabil. Selain itu, kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah yang disebutkan Wahyudi juga berdampak pada lambatnya respon terhadap masalah-masalah sistemik yang dialami di lapangan, sehingga penyempurnaan SIPD cenderung berjalan lambat dan tidak adaptif terhadap kebutuhan pengguna. Lebih lanjut, penelitian Putri Pandan Wangi (2023) menemukan bahwa penggunaan SIPD di Kabupaten Semarang masih belum efektif dan tetap memerlukan sistem pendukung lain seperti SIPKD. Hal ini mencerminkan adanya dualisme sistem yang dapat menambah beban kerja administratif yang semestinya dapat diminimalkan, termasuk dalam studi ini, di mana pegawai dituntut untuk menyalahi keterbatasan SIPD dengan cara manual atau menggunakan sistem lain yang lebih stabil.

Berbeda dengan temuan Elisye Elisye Lumuly dan Rita J. D. Atarwaman (2024) menyebutkan bahwa efektivitas penggunaan SIPD memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, meskipun implementasinya tidak langsung berdampak signifikan. Dalam konteks ini, perlu dicermati bahwa efektivitas hanya akan tercapai apabila sistem berjalan stabil dan didukung oleh SDM yang kompeten. Temuan dalam penelitian ini justru menekankan bahwa gangguan sistem dan beban pegawai menjadi hambatan utama tercapainya efektivitas tersebut. Artinya, potensi positif dari SIPD belum dapat terwujud karena masih tersendat oleh kendala implementatif.

### **3.8 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan empat faktor utama yang memengaruhi optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu, yaitu sistem, infrastruktur jaringan dan sumber daya manusia serta komitmen pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Hambatan timbul pada faktor sistem dan infrastruktur jaringan dalam mengoperasikan SIPD, sumber daya diluar OPD BPKAD Kabupaten Dompu serta lemahnya koordinasi dengan kemendagri dalam mengatasi masalah yang timbul karena sistem error dan mengakibatkan keterlambatan dalam menginput serta meningkatkan resiko human error.

Upaya yang ditemukan penulis lebih berfokus pada peningkatan infrastruktur jaringan dan pengembangan sistem pendukung, penguatan koordinasi dengan pihak kemendagri, dan pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan kecakapan OPD pengguna SIPD diluar BPKAD sebagai bentuk konkrit dalam optimalisasi penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIPD di BPKAD Kabupaten Dompu masih belum optimal, terutama dalam penyusunan laporan keuangan. Analisis berdasarkan enam dimensi Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean (2003) menunjukkan bahwa SIPD belum sepenuhnya memenuhi harapan pengguna. Pada dimensi kualitas sistem, masih ditemukan error dan bug yang mengganggu keandalan, ketepatan waktu, dan kemudahan penggunaan. Kualitas informasi pun belum maksimal; meskipun akurasi dan relevansi sudah baik, konsistensi, kelengkapan, dan ketepatan waktu masih kurang. Kualitas pelayanan cukup baik dari sisi empati, keandalan, jaminan, dan fisik, namun perlu peningkatan dalam kecepatan respons. Penggunaan SIPD masih sebatas alat bantu, belum

terintegrasi penuh, sehingga kepuasan pengguna masih rendah, khususnya dalam efektivitas dan efisiensi pelaporan. Manfaat SIPD baru terasa pada kemudahan akses informasi, belum signifikan dalam meningkatkan kualitas informasi dan kinerja laporan keuangan.

Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen pemerintah daerah, kompetensi SDM di BPKAD, serta regulasi yang mendukung. Sedangkan hambatannya adalah jaringan internet yang lambat, gangguan sistem, koordinasi yang kurang responsif dengan Kemendagri, dan rendahnya kemampuan SDM di luar BPKAD. Upaya perbaikan telah dilakukan melalui peningkatan jaringan, pelatihan bagi OPD, dan penguatan koordinasi pusat-daerah untuk mendukung optimalisasi SIPD ke depan.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini terbatas pada satu instansi sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke OPD atau daerah lain. Data yang diperoleh sebagian besar bersifat subjektif karena bersumber dari wawancara dan observasi. Keterbatasan waktu juga membatasi analisis terhadap pembaruan sistem yang mungkin terjadi setelah pengumpulan data.

**Arah Masa Depan Penelitian:** Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat difokuskan pada perluasan objek studi ke daerah lain untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai optimalisasi SIPD. Selain itu, pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode dapat digunakan untuk mengukur dampak SIPD secara objektif.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Dompu dan seluruh pihak yang membantu dan ikut serta dalam proses penelitian ini.



## 6. DAFTAR PUSTAKA

- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Fernandes, S. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan. Bandung, Alfabeta, 190. <https://doi.org/10.4236/ojepi.2023.131002>
- Heeks, R. (2005). *Implementing and managing eGovernment: an international text*. <http://dx.doi.org/10.4135/9781446220191>
- Jaeger, P. T., & Thompson, K. M. (2003). E-government around the world: Lessons, challenges, and future directions. *Government Information Quarterly*, 20(4), 389–394. <http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2003.08.001>
- Kalogirou, V., Stasis, A., & Charalabidis, Y. (2022). Assessing and improving the National Interoperability Frameworks of European Union Member States: The case of Greece. *Government Information Quarterly*, 39(3), 101716. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101716>
- Lumuly, E., & Atarwaman, R. J. D. (2024). PENGARUH IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD), TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN KOTA AMBON (STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KOTA AMBON). *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 6(02), 147–159. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1055>
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi. [https://books.google.co.id/books/about/AKUNTANSI\\_SEKTOR\\_PUBLIK\\_Edisi\\_Terba](https://books.google.co.id/books/about/AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_Edisi_Terba)
- Pimenta, C., & Seco, A. (2021). *Financial Management Information Systems (FMIS): Project Guide: Strategic, Functional, Technological, and Governance Issues in the Design and Implementation of New Platforms for Public Financial Management Systems*. <https://publications.iadb.org/en/financial-management-information-systems-fmis-project-guide-strategic-functional-technologica>
- Pramana, A. C., Yap, N., Rukmini, M., Mahmudi, S., & Agustina, E. (2023). Analisis Penerapan SIPD Pada BPKAD Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Ekuivalensi*, 9(1), 45–58. <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/926>
- Scholl, H. J., & Klischewski, R. (2007). E-government integration and interoperability: framing the research agenda. *International Journal of Public Administration*, 30(8–9), 889–920. <https://doi.org/10.1080/01900690701402668>
- Sinurat, M. (2018). Akuntansi Keuangan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia, 115–117. <http://143.198.203.79/opac>
- Suwanda, D. (2015). Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual. Penerbit PPM Indonesia. <https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp>

Tajuddin, M., Nimran, U., & Astuti, E. S. (2016). *Kesuksesan Sistem Informasi Perguruan Tinggi dan Good University Governance: Sebuah Kajian Empiris Di perguruan Tinggi Swasta*. Universitas Brawijaya Press. <https://onsearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000875081>

Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 79–91. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMB/article>

Wahyudi, K. P. (2024). *Optimalisasi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*. IPDN. <http://dx.doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4381>

Wangi, P. P. (2023). *Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah*. IPDN. <http://eprints.ipdn.ac.id/13668/&ved>

